

The Integration of Democratic Values in Learning from an Islamic Education Perspective

Lusia Mumtahana¹, Madkan Madkan²

¹ Universitas Islam Lamongan ² Universitas Islam Darul Ulum Lamongan
lusiamumtahana@unisla.ac.id madkan@unisda.ac.id

Abstract

This article aims to analyze and describe democratic values in learning from the perspective of Islamic education. The study employs a qualitative method with a library research approach. The findings reveal that implementing democracy in the learning process is crucial, especially because students come from diverse backgrounds. Before teaching, educators must understand the characteristics of each student to select appropriate methods for effective instruction. Applying democratic principles in teaching, such as openness, encourages students to be more active, creative, and collaborative, thereby facilitating the achievement of educational goals. To realize democratic learning, several approaches can be implemented: an individual approach, tailored to the specific needs of each student; a group approach, emphasizing collaboration; an experiential approach, grounded in direct practice; a habitual approach, to consistently instill positive values; and an emotional approach, fostering harmonious relationships between teachers and students. By integrating democratic values into the learning process, Islamic education can become more inclusive, relevant, and adaptive to the needs of students.

Keywords: *Democratic Values, Learning, Islamic Education*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran dari perspektif pendidikan Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan demokrasi dalam proses pembelajaran sangat penting, terutama karena peserta didik berasal dari latar belakang yang beragam. Sebelum mengajar, guru perlu memahami karakteristik masing-masing peserta didik untuk memilih metode yang tepat dalam menyampaikan pembelajaran. Penerapan prinsip demokrasi dalam pengajaran, seperti keterbukaan, mendorong siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan kolaboratif, sehingga tujuan pendidikan lebih mudah tercapai. Untuk mewujudkan pembelajaran yang demokratis, beberapa pendekatan yang dapat diterapkan adalah: pendekatan individual, yang menyesuaikan kebutuhan masing-

Correspondence authors:

Lusia Mumtahana, lusiamumtahana@unisla.ac.id

How to Cite this Article

Mumtahana, L., Madkan, M. (2024). The Integration of Democratic Values in Learning from an Islamic Education Perspective. *Jurnal Paradigma*, 16(2), 166-179. <https://10.53961/paradigma.v16i2.229>



Copyright © 2024. Lusia Mumtahana, Madkan Madkan. Jurnal Paradigma is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

masing siswa; pendekatan kelompok, yang mengedepankan kerja sama; pendekatan pengalaman, yang berbasis pada praktik langsung; pendekatan pembiasaan, untuk menanamkan nilai-nilai positif secara konsisten; dan pendekatan emosional, untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam proses pembelajaran, pendidikan Islam dapat menjadi lebih inklusif, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

Kata Kunci: *Nilai-Nilai Demokrasi, Pembelajaran, Pendidikan Islam*

Pendahuluan

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses timbal balik dari tiap individu dalam penyesuaian dirinya dengan lingkungan, baik alam, sesama manusia, maupun alam semesta. Pendidikan menjadi kebutuhan dasar manusia dalam mempersiapkan masa depan, sehingga tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang dan berpotensi terbelakang (Rizki Ramdani, Dinie Anggraeni Dewi, 2021). Pendidikan yang berkualitas berperan sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa dan menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan zaman (Mumtahanah, 2014). Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pengembangan potensi intelektual, moral, dan jasmani, tetapi juga sebagai wahana pembentukan individu yang sadar akan nilai-nilai kemanusiaan.

Di antara nilai-nilai penting yang perlu diintegrasikan dalam pendidikan adalah nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dalam pendidikan tidak hanya mencakup pemberian kesempatan yang sama kepada semua individu untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang dialogis dan partisipatif antara pendidik dan peserta didik (Durhan, 2019). Pendidikan demokrasi berfungsi sebagai medium untuk mengembangkan kesetaraan, toleransi, dan kebebasan berpikir, yang merupakan prasyarat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam perspektif Islam, pendidikan demokrasi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan pada kesetaraan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Daulay, 2017).

Proses pembelajaran yang demokratis membutuhkan guru yang tidak hanya kompeten secara intelektual tetapi juga memiliki karakter kuat dan kemampuan literasi yang memadai (Sukma Alifatul Faizah, Risa Susanti, Machmudah, 2022). Guru memainkan peran sentral dalam membangun suasana belajar yang inklusif, di mana peserta didik diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam Islam, prinsip demokrasi dalam pendidikan mencakup kebebasan individu untuk mengembangkan potensi diri sejalan dengan nilai-nilai moral dan spiritual (Rohman, 2014). Dengan demikian, pendidikan Islam

demokratis dapat menjadi model ideal dalam menjawab tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas keislaman.

Kajian sebelumnya menunjukkan pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan. Penelitian Muhammad Roihan Daulay menekankan prinsip persamaan dalam belajar, di mana tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin dalam memperoleh pendidikan. Sementara itu, Ayu Lestari mengungkapkan bahwa pendidikan Islam menghargai keragaman latar belakang individu, baik etnis, agama, maupun sosial budaya. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam dapat menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan (Ayu Lestari, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran, khususnya dari perspektif pendidikan Islam. Kajian ini penting untuk menjawab kebutuhan pendidikan masa kini yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga penguatan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menggunakan pendekatan teoritik yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum dan praktik pendidikan yang lebih inklusif dan demokratis.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau konsep yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2015). Pendekatan ini dirancang untuk memberikan hasil yang aplikatif dan dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut: Pencarian Literatur: Mengidentifikasi dan memilih sumber data seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya yang mendukung analisis nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Telaah Data: Membaca secara kritis, mencatat poin-poin penting, dan mengelompokkan informasi sesuai dengan kerangka teori yang telah direncanakan. Klasifikasi Informasi: Mengorganisasikan data ke dalam tema atau subtema untuk mempermudah analisis mendalam.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tahapan berikut: Editing: Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data, memastikan tidak ada informasi yang terlewat atau tidak relevan (Tim Dosen Fak. Syari'ah, 1989). Pengorganisasian: Menyusun data secara sistematis sesuai dengan tema penelitian untuk memberikan paparan yang jelas dan terstruktur. Analisis Deskriptif: Menggunakan metode analisis deskriptif untuk menginterpretasikan data dalam bentuk narasi yang mudah dipahami (Lexy J. Moloeng, 1996).

Proses penyimpulan data dilakukan dengan dua pendekatan: Induktif: Menyimpulkan konsep umum dari data khusus yang diperoleh selama penelitian. Deduktif: Menghubungkan data dengan teori atau konsep umum untuk menghasilkan kesimpulan spesifik yang relevan dengan fokus penelitian (Lexy J. Moloeng, 1996).

Pembahasan dan Diskusi

Pembahasan

Dalam proses pembelajaran, peserta didik berperan sebagai subjek sekaligus objek kegiatan pengajaran. Oleh karena itu, inti dari pengajaran terletak pada aktivitas belajar peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan pengajaran hanya dapat terwujud jika peserta didik terlibat secara aktif, baik secara fisik maupun mental. Keaktifan yang bersifat parsial, misalnya hanya melibatkan fisik tanpa disertai pikiran dan emosional, tidak akan menghasilkan perubahan berarti dalam diri peserta didik. Padahal, hakikat belajar adalah terjadinya perubahan yang positif dan signifikan dalam diri seseorang sebagai hasil dari proses pembelajaran. Meski demikian, tidak semua perubahan dapat dikategorikan sebagai hasil belajar, seperti perubahan akibat mabuk, gangguan mental, atau perubahan fisik alami.

Proses mengajar bagi seorang pendidik membutuhkan kehadiran peserta didik sebagai subjek belajar. Namun, belajar tidak selalu bergantung pada keberadaan seorang guru, karena pada dasarnya pembelajaran mencakup lebih dari sekadar transfer pengetahuan. Pembelajaran juga mencakup keterampilan guru dalam menciptakan interaksi yang efektif, mengelola situasi belajar, dan memotivasi peserta didik untuk mencapai potensi maksimal mereka (Mumtahana dkk., 2022).

Belajar dan mengajar adalah dua konsep yang saling melengkapi. Guru sebagai pengajar dan peserta didik sebagai pembelajar merupakan elemen dwi tunggal yang tak

terpisahkan dalam proses pendidikan. Namun, salah satu tantangan utama bagi guru adalah pengelolaan kelas. Guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan menarik agar peserta didik tetap termotivasi. Pengelolaan kelas yang baik bukan hanya tugas rutin, tetapi juga kunci keberhasilan pembelajaran yang efektif.

Hakikat mengajar lebih dari sekadar menyampaikan materi; mengajar adalah proses mengatur dan mengorganisasi lingkungan pembelajaran untuk mendorong peserta didik aktif dalam belajar. Pada tahap lanjut, mengajar menjadi bentuk bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu mereka memahami materi dengan lebih baik (Nana sudjana, 1991).

Guru juga perlu menyadari adanya perbedaan gaya belajar di antara peserta didik. Beberapa siswa mungkin cepat memahami materi, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi ini menuntut guru untuk merancang strategi pengajaran yang adaptif dan inklusif sesuai kebutuhan masing-masing individu.

Dengan demikian, jika hakikat belajar adalah "perubahan", maka hakikat belajar-mengajar adalah "pengaturan". Guru berperan sebagai fasilitator yang mengatur proses pembelajaran untuk memastikan setiap peserta didik dapat mengalami perubahan yang positif dan bermakna dalam perjalanan pendidikan mereka.

Nilai Demokrasi Pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam

Keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan pendidik, tetapi juga pada keterlibatan aktif peserta didik. Kolaborasi yang harmonis antara pendidik dan peserta didik merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebesar apa pun upaya pendidik untuk memengaruhi dan membimbing, keberhasilan sulit tercapai tanpa adanya kesiapan mental dan kemauan dari peserta didik itu sendiri. Dalam konteks ini, demokratisasi pendidikan memainkan peran penting, di mana pembelajaran diarahkan tidak hanya pada hal-hal yang relevan dengan kebutuhan kontemporer, tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai masa lalu sebagai pelajaran dan fondasi moral yang kuat (Durhan, 2019).

Sejalan dengan pandangan Winarto (2007), pembentukan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan melibatkan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar. Nilai-nilai demokrasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi dan kewenangan dalam sistem pemerintahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebenaran, estetika, etika, dan moral dalam

kehidupan sehari-hari (Rizki Ramdani, Dinie Anggraeni Dewi, 2021). Pendidikan yang demokratis menciptakan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka dengan tetap menghargai kebebasan berpendapat dan pengakuan terhadap perbedaan.

Proses pembelajaran yang efektif membutuhkan metode yang tepat sebagai medium utama untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, metode pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi sarana untuk mentransformasikan materi pelajaran ke dalam bentuk yang mudah dipahami oleh peserta didik. Sebagaimana dikemukakan dalam adagium klasik *al-Tharīqah ahammu min al-Maddah* (metode lebih penting daripada materi), penyampaian yang menarik dan komunikatif dapat lebih mudah diterima peserta didik, meskipun materinya sederhana. Sebaliknya, materi yang berkualitas tinggi akan sulit dipahami jika disampaikan dengan cara yang monoton dan tidak menarik (Armai Arief, 2002).

Dalam konteks ini, penerapan metode pembelajaran yang tepat menjadi elemen krusial untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Metode yang efektif tidak hanya mampu menjembatani komunikasi antara pendidik dan peserta didik, tetapi juga dapat memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi

Dalil Al Qur'an Yang mengajarkan Tentang Prinsip Demokrasi diantaranya: *Pertama*, Ayat Tentang dianjurkan musyawarah “*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya*” (Surat Ali Imran Ayat 159)

Ayat ini menekankan pentingnya bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Musyawarah mencerminkan pengambilan keputusan secara kolektif dengan menghargai pandangan semua pihak. Nilai ini menjadi esensi demokrasi dalam Islam, di mana pemimpin dianjurkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga menunjukkan sikap kelembutan, pengampunan, dan kearifan seorang pemimpin sebagai bagian integral dari kepemimpinan yang demokratis.

Kedua, kepemimpinan yang demokratis “*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan)*

dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Surat Asy-Syura Ayat 38)

Dalam ayat ini, urusan kaum mukminin diputuskan melalui musyawarah. Prinsip ini menegaskan bahwa keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban dalam sebuah sistem masyarakat yang adil. Musyawarah adalah cara untuk mencapai konsensus yang mewakili kepentingan banyak pihak.

Prinsip musyawarah dalam Islam sejalan dengan praktik deliberasi dalam demokrasi modern, di mana setiap individu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan diambil.

Ketiga, Tentang Keadilan “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Surat Al-Maidah Ayat 8)

Ayat ini menyerukan kepada umat Islam untuk berlaku adil, bahkan kepada pihak yang mungkin mereka benci. Keadilan dianggap sebagai sifat yang mendekatkan seseorang kepada ketakwaan. Dalam demokrasi, keadilan menjadi dasar dalam penegakan hukum dan perlakuan yang setara terhadap semua warga negara, tanpa diskriminasi.

Keempat, setara terhadap semua warga negara, tanpa diskriminasi. “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)” (Surat Asy-Syura Ayat 15)

Ayat ini menegaskan perintah untuk berlaku adil kepada semua pihak tanpa memihak kepada hawa nafsu. Pemimpin dalam Islam diamanahkan untuk bertindak adil sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan agama mereka. Keadilan adalah pilar utama demokrasi, baik dalam konteks hukum, sosial, maupun ekonomi. Tanpa keadilan, sistem demokrasi akan kehilangan legitimasi.

Kelima, Tentang Persamaan “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Surat Al-Hujurat Ayat 13)

Ayat ini menekankan bahwa semua manusia diciptakan setara tanpa membedakan ras, suku, atau gender. Perbedaan hanyalah untuk saling mengenal, dan derajat manusia di sisi Allah diukur berdasarkan ketakwaan, bukan status sosial atau kekayaan. persamaan adalah prinsip dasar dalam demokrasi, di mana semua individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan hak untuk berpartisipasi dalam sistem politik.

Keenam, Tentang Amanah “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Surat An-Nisa’ Ayat 58)

Ayat ini mengajarkan pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. Pemimpin atau pemangku amanah wajib menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dengan integritas tinggi. amanah dalam demokrasi tercermin dalam akuntabilitas pemimpin kepada rakyat yang memilih mereka. Rakyat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pemimpin mereka.

Ketujuh, Tentang Kebebasan Mengkritik “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Surat Ali Imran Ayat 104)

Ayat ini memerintahkan umat untuk menyerukan kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah kemungkaran. Kritik konstruktif terhadap pemimpin atau sistem merupakan bagian dari tanggung jawab sosial setiap individu. kebebasan mengkritik adalah elemen penting dalam demokrasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap kebijakan atau keputusan pemimpin.

Kedelapan, Tentang Kebebasan Berpendapat “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Surat An-Nisa’ Ayat 59)

Ayat ini menganjurkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Namun, jika terjadi perbedaan pendapat, maka permasalahan harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ayat ini juga mengakui adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat.

Ayat Yang menerangkan tentang keadilan “*Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)” (Surat al-Nisa’ Ayat 83)*

Ayat ini menyoroti pentingnya membedakan informasi yang valid dan tidak valid serta menyarankan agar persoalan besar diserahkan kepada mereka yang berkompeten. kebebasan berpendapat adalah hak asasi dalam demokrasi, tetapi harus diiringi dengan tanggung jawab dan tidak melampaui batas. Pengambilan keputusan melalui perdebatan yang sehat dan berlandaskan fakta juga merupakan nilai inti demokrasi.

Penelusuran analitis terhadap kandungan Al-Qur'an dan Hadis mengungkap berbagai prinsip yang mendasari hubungan antara guru dan murid dalam pendidikan Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (Hamdani Ihsan, 1998)

Pertama, Pendidikan Islam mengakui keberadaan fitrah sebagai potensi dasar yang dianugerahkan Allah kepada setiap individu. Fitrah ini merupakan kemampuan bawaan yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan yang dirancang dengan metode yang tepat, efektif, dan efisien. *Kedua*, Pendidikan Islam meyakini pentingnya menjaga dan mengarahkan perkembangan fitrah manusia agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif. Hal ini diwujudkan melalui program-program pendidikan yang selaras dengan cita-cita Islam, seperti menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan intelektual. *Ketiga*, Pendidikan Islam mengupayakan terciptanya harmonisasi antara masukan instrumental (seperti kurikulum dan metode) dengan masukan lingkungan (seperti keluarga dan masyarakat). Sinergi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan idealitas Islam, yaitu manusia yang bertakwa dan berilmu. *Keempat*, Guru dalam pendidikan Islam memiliki peran strategis untuk menghindarkan peserta didik dari pengaruh negatif. Mereka dituntut untuk merancang program pendidikan yang mampu mengembangkan potensi siswa secara optimal, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islami. *Kelima*, Pendidikan Islam mengedepankan

fleksibilitas dalam proses pembelajaran, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan hidup siswa, baik sebagai hamba Allah maupun anggota masyarakat. Model pembelajaran yang lentur ini bertujuan untuk menciptakan individu yang mampu menghadapi dinamika kehidupan dengan nilai-nilai Islam sebagai pedoman. *Keenam*, Segala bentuk upaya pendidikan dalam Islam selalu berlandaskan pada pengembangan iman dan ilmu pengetahuan yang saling memperkokoh. Kombinasi ini tidak hanya membangun kepribadian muslim yang kokoh, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang berilmu dan berakhlak mulia.

Melalui prinsip-prinsip ini, pendidikan Islam tidak hanya menjadi sarana pengembangan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi Islami. Proses belajar mengajar dalam Islam menjadi wahana untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga beriman, bermoral, dan mampu menghargai perbedaan dalam semangat ukhuwah dan keadilan.

Diskusi

Mengutip pandangan Naim dan Sauqi (2011), demokrasi dalam pendidikan dapat dipahami sebagai proses pembebasan manusia dari sistem dan struktur hukum yang secara tradisional menempatkan individu sebagai komponen pasif dalam roda pendidikan. Dalam kerangka demokrasi ini, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai lama yang relevan, tetapi juga memberikan ruang untuk mempertanyakan, meninjau ulang, dan merevisi nilai-nilai tersebut agar tetap sesuai dengan dinamika zaman (Madkan & L. Mumtahana, 2022). Dengan demikian, demokrasi dalam pendidikan memungkinkan siswa untuk berkembang menjadi individu yang aktif, kritis, dan kreatif, sekaligus menciptakan ekosistem pembelajaran yang fleksibel terhadap perubahan.

Pendekatan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip konstruktivisme, yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan, pengalaman, dan kolaborasi. (Vygotsky, 1978), melalui konsep zone of proximal development (ZPD), menekankan bahwa pembelajaran optimal terjadi ketika siswa didukung melalui bimbingan guru dan interaksi dengan teman sebaya. Dengan pendekatan pengalaman, pembiasaan, dan kerja kelompok, siswa dapat belajar tidak hanya dari instruksi langsung, tetapi juga dari proses berbagi gagasan dan menghadapi tantangan bersama.

Pendidikan demokrasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter siswa. (Rosyad & Maarif, 2020) menggambarkan pendidikan demokrasi sebagai proses sosialisasi, internalisasi, dan

aktualisasi nilai-nilai demokrasi. Hal ini bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang menghargai keragaman, membangun kesadaran kritis, dan memperkuat solidaritas sosial. Pendidikan ini menanamkan nilai-nilai dasar seperti kebebasan, toleransi, keadilan, dan kemanusiaan dalam proses pembelajaran.

Menurut Muwafiqur Rohman, demokrasi dalam pendidikan mencakup berbagai nilai fundamental yang membangun lingkungan belajar yang inklusif dan humanis. Beberapa nilai utama yang diusung pendidikan demokrasi meliputi: 1). Kesetaraan (*Egalitarianisme*): Semua siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, agama, suku, atau status sosial. 2). Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia: Pendidikan demokrasi menanamkan penghormatan terhadap hak-hak dasar, seperti kebebasan berpikir, berbicara, dan belajar. 3). Perlindungan (*Protection*): Sistem pendidikan harus melindungi siswa dari diskriminasi dan kekerasan, baik fisik maupun psikologis. 4). Keberagaman (*Pluralisme*): Keberagaman adalah kekayaan yang harus dihormati, dan siswa diajarkan untuk hidup dalam harmoni di tengah masyarakat multikultural. 5). Keadilan (*Justice*): Setiap keputusan pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan, sehingga tidak ada siswa yang dirugikan. 6). Toleransi: Pendidikan mengajarkan siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya, pandangan, dan keyakinan. 7). Kemanusiaan: Empati, solidaritas, dan rasa kemanusiaan menjadi inti dari pendidikan demokrasi. 8). Ketertiban: Demokrasi juga mengajarkan pentingnya aturan dan tata tertib untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran. 9). Kebebasan: Kebebasan berpikir, berbicara, dan berpendapat menjadi landasan penting dalam proses belajar mengajar. 10). Tanggung Jawab: Siswa dilatih untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. 11). Kebersamaan: Semangat gotong royong dan kerja sama ditanamkan melalui berbagai aktivitas kelompok. 12). Kemakmuran: Pendidikan demokrasi berorientasi pada kesejahteraan bersama, baik secara material maupun spiritual (Rahman, 2018).

Demokrasi dalam pendidikan harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari di ruang kelas. Salah satu bentuk nyata penerapan demokrasi adalah menciptakan interaksi yang harmonis antara guru dan siswa. Interaksi ini tidak lagi bersifat satu arah, tetapi lebih menyerupai dialog dua arah. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung siswa untuk menjadi subjek aktif dalam pembelajaran.

Dalam teori humanisme, Maslow (1943) dan Rogers (1969) menekankan bahwa pendidikan harus memenuhi kebutuhan dasar siswa, seperti rasa aman, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, siswa lebih termotivasi untuk belajar dan

berkembang secara optimal. Suasana belajar yang humanis, yang diwarnai dengan toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan intelektual, emosional, dan sosial siswa.

Untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa, guru perlu menerapkan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan karakteristik individu. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan meliputi: *Pertama*, Pendekatan Individual: Guru menghormati keunikan setiap siswa dengan menyesuaikan strategi pengajaran sesuai kemampuan dan gaya belajar mereka. *Kedua*, Pendekatan Kelompok: Kerja kelompok mendorong kolaborasi, berbagi ide, dan pembelajaran kolektif, yang juga memperkuat nilai-nilai demokrasi seperti kerja sama dan toleransi. *Ketiga*, Pendekatan Pengalaman: Belajar melalui pengalaman langsung memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa, terutama dalam menghubungkan teori dengan praktik. *Keempat*, Pendekatan Pembiasaan: Nilai-nilai positif seperti tanggung jawab dan kejujuran ditanamkan melalui pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari. *Kelima*, Pendekatan Emosional: Guru memperhatikan aspek emosional siswa untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan harmonis.

Pendidikan demokrasi tidak hanya berfungsi di tingkat individu, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam pembelajaran, siswa tidak hanya menjadi pembelajar yang kritis, tetapi juga agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam masyarakat. Hal ini menuntut kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan relevan (Rosyad & Maarif, 2020).

Guru memegang peran penting dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di kelas. Untuk itu, guru harus terus meningkatkan kompetensinya melalui inovasi metode pembelajaran, memperkuat hubungan harmonis dengan siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kreativitas dan partisipasi aktif. Melalui upaya ini, pendidikan demokrasi dapat menjadi landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat.

Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu, tetapi juga menjadi fondasi untuk menciptakan generasi yang berkarakter, kritis, dan mampu menghadapi tantangan global dengan wawasan yang luas. Demokrasi dalam pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Conclusion

Demokrasi dalam proses Pembelajaran sangat penting, Karena Anak didik yang berasal dari lingkungan yang berbeda jadi sebelum mengajar seorang guru diharuskan untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing anak didik, agar dalam pelaksanaan pembelajaran seorang guru dapat memilih cara yang tepat untuk memahami siswa. Proses pembelajaran dalam pendidikan agama islam tidak jauh berbeda dengan proses belajar mengajar pada umumnya. dan yang perlu diperhatikan adalah adanya pengembangan atau perubahan pada metode yang di terapkan pendidikan agama islam sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam pendidikan agama islam demokrasi mengajar juga sangat dianjurkan karena dengan adanya keterbukaan akan menimbulkan siswa yang aktif, kreatif dan akan membantu untuk mencapai tujuan pendidikan.

References

- Ayu Lestari. (2022). Demokrasi Pendidikan Islam: Konsep Dan Implementasinya. *An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, 8(1), 1–12.
- Daulay, M. R. (2017). Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.632>
- Durhan, D. (2019). Internalisasi Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Islam (Belajar dari Praktik Demokrasi dalam Pendidikan Islam di Pakistan, Mesir dan Turki). *Ahsana Media*, 5(1), 50–59. <https://doi.org/10.31102/ahsana.5.1.2019.50-59>
- Lexy J. Moloeng. (1996), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Madkan & L. Mumtahana. (2022). Internalizing The Value of Multicultural Education Through Islamic. 20–26.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- Mumtahana, L., Ikmal, H., & Sari, A. A. (2022). Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Media Lempar Dadu Dan Metode Tanya Jawab Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak. *Chalim Journal of Teaching and Learning*, 2(1), 1–6.
- Mumtahanah, N. (2014). Penggunaan Media Visual Dalam Pembelajaran PAI. *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 91–104.
- Piaget, J. (1970). *Science of Education and the Psychology of the Child*. New York: Viking Press.
- Rahman, M. (2018). Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat Dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan Indonesia). *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 3(2). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v3i2.44>

- Rizki Ramdani, Dinie Anggraeni Dewi, Y. F. F. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Dewantara*, 5(3), 9034–9038.
- Rohman, N. (2014). Perspektif Islam tentang Demokratisasi Pendidikan. *Tarbawi*, 2(2), 56–68.
- Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 75–99. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>
- Rogers, C. R. (1969). *Freedom to Learn: A View of What Education Might Become*. Columbus, OH: Merrill Publishing.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, 308.
- Sukma Alifatul Faizah, Risa Susanti, Machmudah, L. M. (2022). Strategi Peningkatan Literasi Digital Di Lembaga Madrasah Ibtidaiyah. *Al-Mada: Jurnal ...*, 5(4), 451–463.
- Tim Dosen Fak. Syari'ah. (1989). *Podoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.